

Optimalisasi Peran Strategis BUMD Dorong Peningkatan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,05/04/2024

Komisi II DPRD Kaltim kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) guna mengoptimalkan dan menyinergikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

SAMARINDA – Raker Komisi II DPRD Kaltim kali ini bersama mitra kerja. Di antaranya Asisten II Setda Prov Kaltim, Biro Hukum Setda Prov Kaltim, Biro Ekonomi Setda Prov Kaltim, PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT BPD Kaltimtara, PT. Jamkrida Kaltim, PD Sylva Kaltim Sejahtera, dan Tim Perumus BUMD MBTK di Ruang Titanium 1 Hotel Platinum Balikpapan, Senin (1/4).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Muin memimpin jalannya kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka "Optimalisasi Peran Strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur" itu. Turut hadir Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo beserta anggota Komisi II di antaranya Sapto Setyo Pramono, Ambulansi Komariah, Ely Hartati Rasyid, Agiel Suwarno, Muhammad Adam, Siti Rizky Amalia, dan Ismail.

Baharuddin Muin menyampaikan terdapat tiga poin penting yang perlu didiskusikan bersama mitra kerja. Pertama, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Perusda Sylva Kaltim Sejahtera, PTMMP dan Penjaminan Kredit Daerah Kaltim. Kedua terkait perkembangan pencairan modal kerja bisnis Perusda Bank Kaltim, dan ketiga rencana pembentukan BUMD baru pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

"Kita diskusikan masalah kinerja dari BUMD Kaltim, masalah penyaluran kredit, pengembangan pelayanan, rasio keuangan serta realisasi tahun anggaran 2023 dan rencana PAD tahun mendatang," ujar Muin saat membuka Raker.

Tidak kalah penting diutarakannya dalam pertemuan ini yakni membahas tentang pembentukan BUMD baru yang akan mengelola KEK MBTK. "Ini harus dibahas lebih komprehensif, supaya kami dari Komisi II DPRD Kaltim bisa yakin dan menyetujui serta mendukung pembentukan BUMD ini," tekannya.

Komisi II dalam hal ini secara prinsip menyetujui terhadap Ranperda Perubahan Bentuk Perusda khususnya SKS, PT. MMP dan PT. Jamkrida yang diajukan oleh Pemprov Kaltim. Yakni dengan syarat menyelesaikan audit yang dilakukan Konsultan Audit Publik (KAP) dan *cut off* pertanggungjawaban pergantian direksi.

Mengenai usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait Ranperda Perubahan Bentuk PT. MMP dan PT. Jamkrida Kalimantan Timur akan dibahas di Komisi II lebih lanjut dikarenakan perubahan tidak sampai 50 persen.

Sementara itu, usulan Ranperda Perubahan Bentuk PT. Sylva Kaltim Sejahtera untuk sementara waktu ditunda sampai lengkapnya dokumen pendukung dan akan dibahas pada agenda masa sidang II.

Selanjutnya mengenai usulan perubahan bentuk PT. Agro Kaltim Utama (AKU) akan dibahas setelah dokumen pendukung dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Lalu terkait Perda PT. BPD Kaltimara sebagaimana yang telah didiskusikan tidak menghambat bisnis yang sedang berjalan saat ini. (**adv/hms11/er/k8**)

Sumber berita:

Kaltim Post, Optimalisasi Peran Strategis BUMD Dorong Peningkatan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim, 05/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan pemerintah daerah.
 - (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

2. Dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) PP 54/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.